

IRONI PENCALONAN DAN PRAGMATISME PARTAI POLITIK¹

Oleh Didik Supriyanto²

01. Sepanjang 9-22 April 2013 KPU, KPU provinsi dan KPU kabupaten/kota membuka pendaftaran calon anggota legislatif untuk Pemilu 2014 nanti. Setelah melakukan verifikasi atas persyaratan pencalonan partai politik dan verifikasi persyaratan masing-masing calon, KPU, KPU provinsi dan KPU kabupaten/kota akan mengumumkan Daftar Calon Sementara (DCS) untuk mendapatkan masukan masyarakat. Selanjutnya KPU, KPU provinsi dan KPU kabupaten/kota masing-masing akan menetapkan Daftar Calon Tetap (DCT) DPR, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota untuk Pemilu 2014. Nah, dalam proses penyusunan DCS/DCT ini terdapat beberapa ironi partai politik.
02. Pertama, hampir semua partai politik mengumumkan secara terbuka rekrutmen calon anggota legislatif dengan tujuan untuk mencari orang-orang terbaik yang akan dicalonkan menjadi anggota legislatif. Tentu saja hal ini kontras dengan pernyataan pimpinan partai politik yang mengklaim bahwa partainya telah melakukan kaderisasi dengan baik. Apalagi sejak berlakunya UU No. 2/2011, sebagian besar bantuan negara (baik dari APBN maupun APBD) digunakan untuk kegiatan pendidikan politik dan kaderisasi. Lalu mengapa, partai politik masih harus melakukan rekrutmen terbuka, seakan-akan menunjukkan bahwa mereka tidak memiliki banyak kader mumpuni?
03. Kedua, semua partai politik mengambil kebijakan: semua anggota DPR, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota dipersilakan mencalonkan kembali di daerah pemilihannya masing-masing pada Pemilu 2014. (Perkecualian terjadi pada mereka yang sudah berusia lanjut, mencalonkan di lembaga legislatif di atasnya atau mempersiapkan diri mengikuti pilkada, serta mengikuti ketentuan internal partai politik yang membatasi masa kerja parlemen). Hal ini berbeda dengan suara publik yang mengecam keras para anggota Dewan yang terlibat kasus-kasus korupsi. Memang baru sebagian dari mereka yang berstatus terpidana, tersangka dan terdakwa, namun partai politik tidak bisa menutup mata, banyak anggota Dewan tersangkut kasus korupsi yang tengah diselidiki dan atau disidik petugas. Orang-orang macam ini tentu saja tidak pantas lagi menjadi pejabat publik. Toh jika diberi kesempatan untuk mencalonkan lagi, kelak mereka berpotensi merusak nama baik partai politik.
04. Ketiga, sebagian partai politik mengeluhkan dan bahkan memprotes ketentuan KPU yang mewajibkan partai politik memenuhi kuota 30% calon perempuan di setiap daerah pemilihan; dan jika tidak terpenuhi, maka partai politik tidak bisa mengikuti pemilu di daerah pemilihan tersebut. Tentu saja sikap itu seakan mengabaikan fakta historis bahwa kebijakan afirmasi buat calon perempuan

¹ Materi pengantar diskusi pada The Indonesian Forum dengan topik *Kesiapan Partai Politik Peserta Pemilu Menjelang Pendaftaran Daftar Calon Sementara Anggota DPR dan DPRD*, yang diselenggarakan oleh The Indonesian Intitute pada 11 April 2013, di Jakarta.

² Ketua Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem).

sudah diberlakukan sejak Pemilu 2004 melalui UU No. 12/2003 dan diperkuat lagi menjelang Pemilu 2009 melalui UU No. 10/2008. Jika kebijakan afirmasi ini sudah berjalan lebih dari 10 tahun, lalu kemana saja selama ini partai politik dalam mengurus kader-kader perempuan? Bukankah sejak Pemilu 2004 mereka berkomitmen untuk meningkatkan jumlah calon perempuan? Bukankah mereka sudah berjanji untuk merekrut lebih banyak lagi kader-kader perempuan? Mengapa kini masih mengeluhkan sulitnya memenuhi kuota 30% calon perempuan?

05. Di balik ironi pencalonan anggota legislatif oleh partai politik tersebut, sebetulnya terdapat jiwa pragmatisme partai politik dalam menghadapi pemilu. Selain lenyapnya ideologi dan pengabaian platform politik, pragmatisme juga disuburkan oleh penggunaan sistem pemilu proporsional daftar terbuka. Karena tujuan partai politik dalam pemilu adalah mendapatkan kursi, maka dalam sistem pemilu ini, partai politik menggunakan logika sederhana: mencalonkan siapa saja yang berpotensi mendapatkan kursi, atau setidaknya-tidaknya dapat menambah perolehan suara guna mendapatkan kursi.

06. Dengan mengikuti apa yang terjadi dalam proses pencalonan anggota legislatif, maka sesungguhnya kita tidak bisa berharap banyak, bahwa anggota legislatif hasil Pemilu 2014 akan membawa perubahan-perubahan signifikan ke depan. Korupsi akan tetap melanda pemerintahan hasil pemilu, karena mereka yang terpilih dalam pemilu bukan orang-orang terbaik dan bersih.